BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

3.1.1 Gambaran Umum Organisasi CPLP

Komunitas CPLP (*Comunidade dos Países de Língua Portuguesa*) atau komunitas negara-negara berbahasa Portugis merupakan salah satu organisassi yang negara anggotanya berbahasa resmi Portugis, dimana unsur geografis dan ekonomi bukan merupakan satu-satunya tolak ukur bagi pembentukan dan pertumbuhan regionalisme. Secara geografis anggota-anggota dari komunitas ini justru terpisah jauh, dimana Brazil merupakan salah satu negara di Amerika Latin, Portugal merupakan negara dari benua Eropa, Angola, Mozambique, Guinea Bissau, Sao Tome dan Principe, dan Cabo Verde masing-masing merupakan negara-negara Afrika. Iniasiatif pembentukan CPLP sendiri setidaknya menunjukan suatu bentuk dan strategi regionalisme baru, yang tidak selalu mengandalkan keseimbangan kekuatan dalam keterlibatan internasional dalam dunia politik global. Kemerdekaan negara-negara koloni Portugis yang tidak diperoleh melalui sengketa dan perang, secara tidak langsung telah menanamkan suatu ikatan sejarah dan budaya yang kemudian menciptakan dan menumbuhkembangkan hubungan baik di antara negara-negara koloni-koloni Portugis. Ikatan sejarah dan hubungan baik yang telah dibina kemudian menjadi dasar yang memudahkan negara-negara tersebut dalam berupaya membentuk suatu komunitas sebagai basis identitas bersama, yang dapat juga dijadikan

sebagai instrumen politik guna memperkuat eksistensi kepentingan bersama dalam ruang lingkup politik global.

Berdasarkan tujuannya yakni, kordinasi politik diplomatik, kerjasama di bidang sosial, politik, ekonomi dan budaya, serta promosi dan penyebarluasan bahasa portugis dan budaya lusophony.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *Comunidade dos Países de Língua Portuguesa* atau CPLP bekerja sama dengan Timor Leste berdasarkan perjanjian multilateral untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberikan manfaat timbal balik melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kemampuan CPLP dalam menghasilkan keuntungan bagi negara-negara anggotanya khususnya Timor Leste dilihat dari tingkat perekonomian, diplomatik dan pendidikan yang diperoleh oleh negara tersebut sudah berkembang. (A CPLP e a cooperação para o desenvolvimento: em que medida a CPLP pode contribuir para odesenvolvimento dos Estados membros Um exemplo: Angola", dalam http://www.Adelinotorres.com/teses/Jovelina%20Imperial_A%20CPLP%20 di akses pada tanggal 12/02/2014 *).*

3.1.1.1 Negara – Negara Anggota CPLP

a) Portugal adalah Sebuah negara yang berbahasa Portugis yang terletak ddi Eropa bagian barat daya dan system pemerintahan Republik, Ibu kota Portugal adalah Lisboa dan Negara ini merdeka pada tahun 868 dan di akui pada 24 Juni 1128. Negara ini berbatasan dengan Spanyol di

sebelah utara dan timur. Di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Selain itu, Portugal juga mempunyai daerah Kepulauan di Madeira, Azores dan Selvagens.

b) Brasil adalah Sebuah negara yang berbahasa Portugis, Brasil dibatasi oleh laut di sebelah timur yaitu Samudra Atlantik. Negara-negara yang berbatasan darat dengan Brasil adalah Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia, Peru, Kolombia, Venezuela, Guyana, Suriname dan department Guyana Perancis; seluruh negara di Amerika Selatan kecuali Ekuador dan Chili. Brasil menganut sistem pemerintahan republik presidensial federal dan dideklarasikan kemerdekaan pada tahun 7 September 1822 dan di akui 29 Agustus 1825.

c) Republik Guinea-Bissau adalah Sebuah negara yang berbahasa Portugis, sebuah negara yang berada di Afrika Barat. Negara ini berbatasan dengan Senegal di utara dan Guinea di sebelah selatan dan timur, dan Samudera Atlantik di sebelah barat. Deklarasi kemerdekaan pada 24 September 1973 dan di akui 10 September 1974.

d) Republik Mozambik adalah sebuah negara di Afrika bagian selatan yang berbatasan dengan Afrika Selatan, Swaziland, Tanzania, Malawi, Zambia dan Zimbabwe. Mozambik merdeka pada tahun 25 Juni 1975 merupakan anggota Komunitas Negara-negara Berbahasa Portugis dan Persemakmuran. Ibu kota sekaligus kota terbesarnya ialah Maputo yang terletak di penghujung bagian selatan.

e) Republik Demokratik Sao Tome dan Principe adalah sebuah negara yang berbahasa Portugis, merdeka pada tahun 12 Juli 1975 dan kepulauan yang terletak 300 km dekat garis khatulistiwa dan 250 km dekat Samudra Atlantik dan terletak di sebelah utara-barat lepas pantai Gabon. Negeri ini merupakan salah satu negara terkecil di Afrika.

f) República de Cabo Verde adalah sebuah negara pulau yang mencakup sebuah kepulauan dari 10 pulau-pulau vulkanik di tengah Samudra Atlantik . Terletak 570 kilometer (350 mil) di lepas pantai Afrika Barat. System pemerintahan Republik dan berbahasa Portugis, merdeka pada tahun 5 Juli 1975.

g) Republik Angola adalah sebuah negara di Afrika bagian selatan berbatasan dengan Namibia di selatan, Republik Demokratik Kongo di sebelah utara, dan Zambia di sebelah timur; pantai barat adalah di Samudra Atlantik dan ibukota adalah Luanda. Sistem pemerintahan Republik Parlamenter dan berbahasa Portugis, merdeka pada tahun 11 November 1975.

h) República Democrática de Timor-Leste adalah sebuah negara di Asia Tenggara. di bagian timur terdapat pulau Timor, pulau-pulau terdekat Atauro dan Jaco, dan Oecusse, di sisi barat laut pulau, dalam Timor Barat Indonesia. Sistem pemerintahan Kesatuan republik semi-presidensial dan berbahasa Portugis dan Tetum, merdeka pada tahun May 20, 2002. (Estados-Membros CPLP dalam http://www.cplp.org/id-22.aspx di akses pada tanggal 19/02/2014)

3.1.1.2 Sejarah Pembentukan CPLP

Pembentukan *Comunidade dos Paises da Lingua Portuguesa* (CPLP) diawali oleh inisiatif dari pemerintah Brasil melalui presidennya, José Sarney dan didukung oleh salah satu lembaga yang dikenal dalam bahasa Portugis dengan nama, *Instituto Internacional da Língua Portuguesa* (IILP) atau lembaga internasional bahasa Portugis yang dibentuk pada KTT yang mempertemukan hampir seluruh negara-negara berbahasa Portugis di São Luis de Maranhão pada tahun 1989. KTT ini kemudian menghasilkan berbagai bentuk kesepakatan, yang salah satu diantaranya adalah rencana pembentukan suatu basis komunitas yang dapat menjadi sebuah organisasi yang memiliki peran dan fungsi dalam mempertahankan, serta menumbuhkembangkan budaya dan bahasa Portugis yang menjadi bagiaan dari warisan sejarah bekas koloni Portugis. Rencana tersebut akhirnya baru dapat direalisasikan pada tanggal 17 Juli 1996 dengan pembentukan *Comunidade dos Paises da Lingua Portuguesa* (CPLP) atau komunitas negara-negara berbahasa portugis.

Pada awal pembentukannya, CPLP beranggotakan tujuh negara yakni, Angola, Brazil, Cabo Verde, Guinea Bissau, Mozambique, Portugal, Sao Tome dan Principe. Timor Leste yang hanya diundang sebagai pengamat dalam pertemuan-pertemuan CPLP sebelumnya sejak tahun 1998, akhirnya bergabung dengan CPLP pada 20 Mei tahun 2002 setelah secara resmi mendapatkan kemerdekaannya dan menambah daftar negara-negara anggota CPLP menjadi delapan.

Negara-negara anggota CPLP adalah negara-negara yang memiliki kesamaan dalam hal sejarah, yakni pernah menjadi bekas koloni bangsa portugis, terkecuali Portugal yang bertindak sebagai bangsa penjajah. Warisan sejarah berupa kebudayaan dan bahasa yang masih dipertahankan dan dipelihara, kemudian menjadi alasan bagi pembentukan komunitas negara-negara berbahasa Portugis atau *Comunidade dos Paises da Lingua Portuguesa* (CPLP).

CPLP mewakili suatu penggabungan bekas negara jajahan Portugis dan tidak seperti komunitas Inggris dan Perancis (negara-negara *Commonwealth* dan komunitas *Francophone*), yang lebih mementingkan kerja sama ekonomi dan pembangunan. CPLP memiliki elemen pembudayaan bahasa Portugis dan "*lusophony*" (warisan kolonial Portugis, yang mengidentifikasikan bekas jajahan Portugis, yang sebagian besar masyarakatnya berbahasa Portugis) yang kuat. Promosi bahasa Portugis jelas disebut sebagai satu dari tiga tujuan utama komunitas ini karena menurut undang-undangnya (pasal 6 ayat 1), semua negara dapat menjadi anggota komunitas selama ia menggunakan bahasa Portugis sebagai bahasa resminya. Dalam CPLP, bahasa Portugis menjadi jembatan untuk menghubungkan negara-negara yang terpisah jauh di antara berbagai benua guna mengeksplorasi kepentingan nasional yang menjadi prioritas dalam membangun kerjasama, demi menciptakan kemajuan dan pembangunan bagi masing-masing negara anggota dan juga CPLP sebagai salah satu organisasi regional.

Komunitas ini memandang dirinya sebagai "proyek politik baru, yang dasar utamanya adalah bahasa Portugis, kaitan sejarah, dan warisan sama kedelapan negara anggotanya yang terpisah secara geografis, tetapi memiliki bahasa yang

sama.” Walaupun sebenarnya bahasa Portugis digunakan mayoritas penduduk hanya di Portugal, Brazil, dan Angola.

Dalam hal kaitan sejarah, anggota-anggota negara dunia ketiga semua diduduki dan kemudian dijajah oleh Portugal selama ratusan tahun, yang tentunya membawa pengaruh-pengaruh yang sama kepada mereka. Terutama dengan anggota-anggota dari Afrika, Timor Leste memiliki hubungan yang dekat karena sejarah penjajahan di bawah kolonialisme Portugis dan gerakan kemerdekaan yang sama.

Dalam perjuangan kemerdekaan dari Portugal di tahun 70an, banyak pemimpin nasionalis Timor Leste mendapatkan dukungan dan inspirasi dari gerakan kemerdekaan di negara-negara seperti Angola, Mozambique, dan Guinea Bissau. Negara-negara ini juga adalah negara-negara pertama yang mengakui kemerdekaan Timor Leste, yang diproklamirkan pada tanggal 28 November 1975. Maka benarlah bahwa CPLP sejak berdirinya selalu secara resmi mendukung perjuangan Timor Leste membebaskan diri dari penjajahan Indonesia. (Conheça *o ILLP*,dalamhttp//:www.iilpcplp.cv/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=54 di akses pada tanggal 28/02/2014*)*

3.1.1.3 Tujuan dan Prinsip CPLP

Secara khusus, yang menjadi tiga pilar sebagai tujuan utama CPLP adalah: Kordinasi Politik Diplomatik, Kerjasama di bidang Sosial, Politik, Ekonomi dan Budaya, serta Promosi dan Penyebarluasan Bahasa Portugis serta Budaya Lusophony (warisan kolonial Portugis, yang mengidentifikasikan bekas

jajahan Portugis, yang sebagian besar masyarakatnya berbahasa Portugis). Koordinasi Politik Diplomatik adalah suatu proses kordinasi politik di antara negara-negara anggota untuk melindungi kepentingan bersama, mempromosikan kepentingan umum, dan menciptakan persatuan suara dalam menanggapai setiap isu-isu yang berkembang dalam dunia politik internasional. Salah satu contoh implementasi kordinasi politik diplomatik CPLP adalah dukungan yang diberikan secara konsisten oleh seluruh negara anggota CPLP dalam mendukung perjuangan Timor Leste dalam menggapai kemerdekaannya, dan juga dukungan terhadap Brasil dan Portugal dalam upaya menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Kerjasama di bidang Sosial, Politik, Ekonomi dan Budaya merupakan salah satu pilar utama CPLP dalam hal pembangunan sosial dan ekonomi, dengan penekanan pada pengembangan sumber daya manusia dan pertukaran informasi di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Pilar ini ditujukan untuk menciptakan kemajuan bagi negara-negara anggotanya, khususnya keenam negara yang menyandang predikat sebagai negara-negara yang lemah secara politik dan ekonomi, seperti; Angola, Cabo Verde, Guinnea Bissau, Mosambique, dan Sao Tome dan Principe, serta Timor Leste. Sedangkan Penyebarluasan Bahasa Portugis Dan Budaya Lusophony merupakan salah satu tujuan utama CPLP yang juga menjadi alasan utama dalam pembentukan komunitas ini. Dalam setiap pertemuan CPLP selalu dibahas mengenai bagaimana caranya mempromosikan dan menyebarluaskan bahasa Portugis di dalam negara-negara anggota dan juga dalam ruang lingkup dunia internasional.

Namun secara umum, sangatlah jelas bahwa sesuai dengan karakteristik CPLP sebagai sebuah organisasi regional, tujuan yang sudah seharusnya diperjuangkan adalah membentuk langkah-langkah praktis dalam upaya pemenuhan target pencapaian pada proyek-proyek yang akan dapat diterjemahkan menjadi manfaat nyata serta memberikan keuntungan bagi semua yang ikut terlibat.

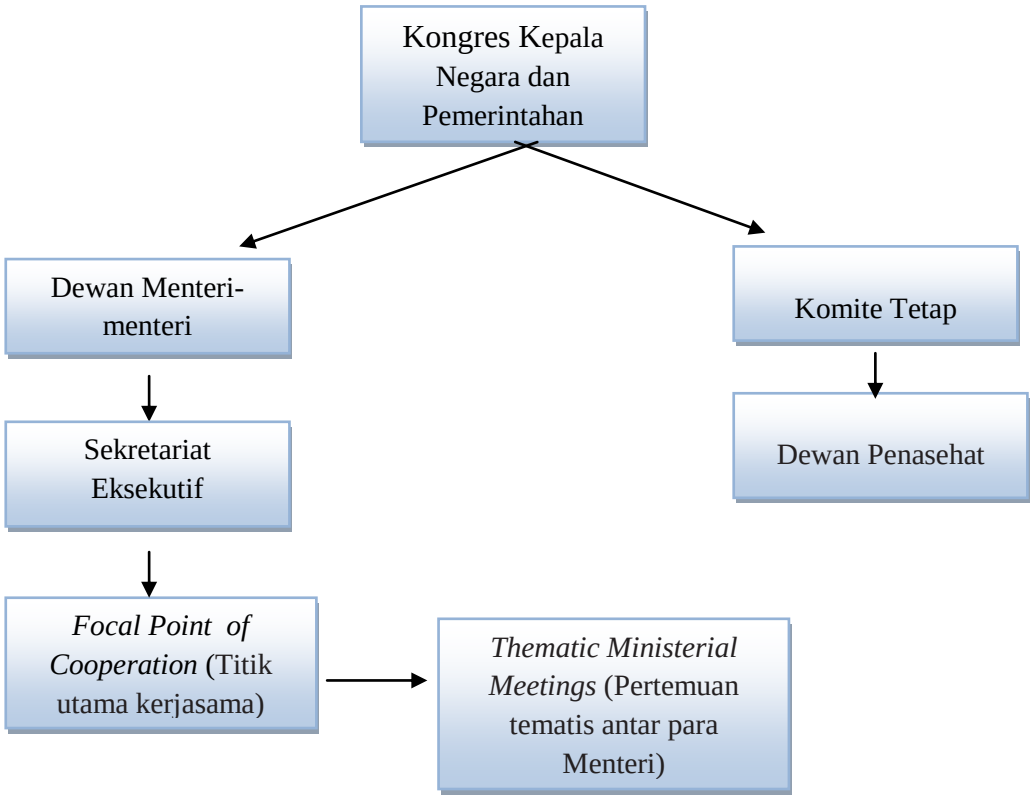
Sejak pendiriannya, CPLP dipandu oleh prinsip-prinsip di bawah ini yaitu:

1. Persamaan hak di antara negara-negara anggota;
2. Non-intervensi dalam masalah internal setiap negaranegara anggota;
3. Saling menghormati jati diri setiap negara-negara anggota;
4. Perlakuan timbal-balik
5. Keunggulan dalam hal perdamaian, demokrasi, perangkat hukum, hak asasi manusia, dan keadilan sosial;
6. Saling menghormati integritas teritorial negara-negara anggota;
7. Promosi pembangunan; Promosi kerja sama yang saling menguntungkan.(Objectivos, dalam http://www.cplp.org/id-46.aspx.pdf diakses pada tanggal 9/03/2014)

3.1.1.4 Struktur CPLP

CPLP terdiri dari tiga badan pembuat keputusan dan satu badan eksekutif yakni, Kongres Kepala Negara dan Pemerintahan, Dewan Menteri-Menteri, Komite Tetap, dan Sekretariat Eksekutif. Selain empat badan yang di atas, CPLP juga memiliki titik utama kerjasama (*Focal Point of Cooperation*) dan pertemuan

menteri-menteri tematis (*Thematic Ministerial Meetings*), serta Dewan Penasehat CPLP.



Sumber: www.cplp.org, 2013.

Gambar 3.1

Struktur CPLP

CPLP terdiri dari tiga badan pembuat keputusan dan satu badan eksekutif. Keputusan di ketiga badan pembuat keputusan dibuat secara konsensus.

1. Kongres Kepala Negara dan Pemerintahan: bertemu setiap dua tahun atau setiap saat dibutuhkan oleh dua pertiga dari anggota. Badan ini terdiri dari badan pemerintah tertinggi di setiap negara-negara anggota, dan adalah badan pembuat keputusan yang tertinggi. Pertemuan berikutnya untuk badan ini akan dilaksanakan di Timor Leste 2014 .

2. Dewan Menteri-Menteri: terdiri dari menteri-menteri luar negeri dari setiap negara anggota. Dewan ini bertemu setiap tahun atau setiap dibutuhkan oleh minimal dua pertiga anggota. Dewan ini bertanggungjawab pada Kongres Kepala Negara dan Pemerintahan.
3. Komite Tetap: terdiri dari satu perwakilan dari setiap negara anggota. Badan ini bertemu setiap bulan di kantor pusat CPLP di Lisabon. Badan ini dikoordinasi oleh perwakilan negara yang sedang menjabat sebagai presiden Dewan Menteri-Menteri.
4. Sekretariat Eksekutif: Ini adalah badan eksekutif CPLP sekarang bernama Murade Isaac Murargy . Badan ini menerapkan keputusan-keputusan yang dibuat di setiap badan pembuat keputusan di atas. Sekretariat ini dikepalai oleh Sekretaris Eksekutif, yang adalah orang penting dari salah satu negara anggota, untuk menjalankan mandat selama dua tahun.
5. Titik Utama Kerja Sama (*Focal Point of Cooperation*), adalah suatu wadah yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan segala kegiatan kerjasama dalam komunitas ini yang mencakup sektor-sektor seperti; administrasi publik dan pemerintahan, ekonomi, pertahanan, urusan parlemen, pendidikan, keuangan, gender, hukum, kesehatan, ketenagakerjaan sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi, telekomunikasi, budaya, lingkungan hidup, pariwisarta, pertanian, perikanan, olahraga, dan kepemudaan.
6. Pertemuan Menteri-Menteri Tematis (*Thematic Ministerial Meetings*), itu sendiri merupakan pertemuan di antara para menteri-menteri dan sekretaris

negara dari negara-negara anggota yang dilangsungkan pada saat tertentu dengan tujuan mengkoordinasikan kegiatan kerjasama di bidangnya masing-masing. Dewan Penasehat CPLP terdiri dari beberapa organisasi seperti Forum Kepemudaan CPLP, Forum Wirausaha CPLP Dewan dan organisasi di luar CPLP yang menjadi bagian dan mitra dari negara-negara anggota yang bekerjasama dengan CPLP seperti: Asosiasi Universitas Bahasa Portugis, Asosiasi Komite Kejuaraan Olimpiade Bahasa Portugis, Yayasan Pengembangan Kemasyarakatan, Assistência Médica Internacional AMI atau Bantuan Medis Internasional, dan lain sebagainya, yang menjadi pengamat dalam pertemuan CPLP sesuai dengan bidangnya masing-masing. (Komunitas negara-negara berbahasa Portugis", http://www.laohamutuk.org/Bulletin.di akses pada tanggal 19/03/2014*)*

3.1.1.5 Status Keanggotaan Dalam CPLP

Kini CPLP beranggotakan delapan negara berdaulat yakni; Angola, Brazil, Cabo Verde, Guinea Bissau, Mozambique, Portugal, Sao Tome dan Principe, dan Timor Leste. Selain itu pada saat ini terdapat pula tiga negara yang telah ditetapkan sebagai pengamat dalam CPLP yakni, Guinea Khatulistiwa, Mauritius, dan Senegal. Guinea Khatulistiwa dan Mauritius resmi ditetapkan sebagai negara pengamat dalam CPLP pada tahun 2006. Sedangkan Senegal ditetapkan sebagai negara pengamat pada tahun 2008. (*Community of Portuguese Speaking Countries*", dalam http//:www.flags of the world.htm, di akses pada tanggal 23/03/2014)

3.1.1.6 Proyek-Proyek Utama Dalam CPLP

Proyek-proyek dalam CPLP dibangun dengan hasil pendanaan dari komunitas sendiri dan juga institusi pemerintah dan swasta negara-negara anggota CPLP, khususnya Brasil dan Portugal sebagai dua negara terkaya dalam keanggotaan CPLP. Badan Pembangunan Brazil (*Agencia Brasileira de Cooperação atau Brazilian Agency for Cooperation*/ABC) dan Institut Bantuan untuk pembangunan Portugal (*Instituto de Português ao apoio de desenvolvimento atau Portuguese Institute for Aid to Development*/IPAD) adalah dua institusi yang terlibat aktif dalam setiap pendanaan maupun pelaksanaan proye-proyek sebagai hasil dari kerjasama antar negara-negara anggota CPLP. Keterlibatan institusi-institusi ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara negara-negara angota CPLP dengan institusi-institusi tersebut dan menjembatani setiap kerangka kerjasama yang dibangun antar negara-negara anggota. Pada saat ini, program-program yang menjadi prioritas dalam misi penting CPLP antara lain:

a. Program HIV AIDS yang dirancang untuk membantu lima negara Afrika anggota CPLP (Angola, Cabo Verde, Guinea Bissau, Mozambique, dan Sao Tome dan Principe.)
b. Pusat Pengembangan ketrampilan kewirausahawan di Luanda, Angola
c. Pusat Pengembangan Admistrasi Publik di Maputo, Mozambique
d. Penyelenggaraan konferensi mengenai penyakit Malaria di São Tome dan Principe

e. Pusat Pengembangan bahasa Portugis sebagai bahasa Resmi dan pelatihan tenaga guru di Timor Leste.
f. Program Sensus Bahasa Portugis
g. Sekolah dan Universitas yang berbasis digital
h. Misi Pemilihan umum untuk Guinea-Bissau
i. Proyek tanggap darurat untuk membantu lembaga-lembaga dalam membangun Guinea-Bissau
j. Pengembangan sektor hukum dan administrasi publik di Timor Leste
k. Pengentasan kemiskinan dan kelaparan Latihan militer gabungan negara-negara CPLP yang diadakan setiap tahun. (Community of Portugues Langauge Countries",dalamhttp://wapedia.mobi/en/Community_of_Portuguese_Language_Countries, di akses pada tanggal 25/03/2014)

3.1.1.7 Sumber Anggaran CPLP

Anggaran badan Sekretariat Eksekutif dalam CPLP biasanya bersumber dari iuran wajib tahunan yang dibayar oleh setiap anggota, ditambah dengan sumbangan sukarela. Badan yang bertanggung jawab untuk menyiapkan anggaran yang kemudian harus disetujui. Oleh Dewan Menteri-Menteri adalah Komite Konsultasi. Namun CPLP sebenarnya adalah komunitas yang tidak memiliki sumber dana yang tetap karena banyak anggota-anggotanya yang menunda pembayaran iuran tahunan mereka dalam jangka waktu yang lama dan ada yang tidak membayar sama sekali karene mengalami krisis ekonomi. Hanya Brazil dan Portugal yang biasanya membayar iuran wajib mereka tepat waktu dan bisa

menyumbang secara sukarela. Anggaran yang disetujui untuk tahun 2010 adalah 1.082.704 euro. Anggaran tersebut didanai iuran anggota tahunan sebesar 30.000 euro setiap anggota dan dengan sumbangan sukarela yang berjumlah 847.704 euro. (Resolution on the Approved Budget for the Executive Secretariat for the year 2010", dalam www.cplp.org, di akses pada tanggal 26/03/2014)

3.1.1.8 Daftar Perjanjian dan Protokol CPLP

Berdasarkan daftar perjanjian dan protokol yang tertulis resmi dalam situs CPLP Juli 2010, secara umum daftar perjanjian dan protokol CPLP terbagi dalam tiga bagian yakni, perjanjian dan protokol intra CPLP, perjanjian dan protokol CPLP dengan Entitas Sipil, dan perjanjian dan protokol dengan organisasi internasional lainnya. Berikut daftar perjanjian dan protokol CPLP :

1. Perjanjian dan protokol intra CPLP
    a. Perjanjian deklarasi konstitutif CPLP.
    b. Statuta CPLP
    c. Perjanjian antara pemerintah negara anggota CPLP tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan penyeludupan narkotika dan psikotropika.
    d. Konvensi kerjasama teknis antara lembaga bea cukai negara-negara anggota CPLP.
    e. Konvensi tentang bantuan administratif timbal balik antara negara-negara anggota CPLP terkait pencegahan, penyidikan dan penindakan pelanggaran bea cukai.

f. Konvensi tentang bantuan administratif timbal balik antara negara-negara anggota CPLP sehubungan dengan upaya melawan penyeludupan narkotika dan psikotropika.
g. Perjanjian tentang pembentukan markas besar CPLP di Portugal
h. Perjanjian kerjasama antara lembaga pendidikan tinggi negara-negara anggota CPLP.
i. Perjanjian umum dalam cakupan kerjasama CPLP.
j. Protokol untuk perjanjian ortografi bahasa Portugis.
k. Perjanjian tentang penghapusan visa dan paspor diplomatik, khusus dan jasa, antara pemerintah negara-negara anggota CPLP
l. Revisi statuta IILP
m. Statuta pusat analisis strategis
n. Perjanjian pemberian *multiple entry* visa untuk kategori orang tertentu.
o. Perjanjian tentang pembentukan persyaratan umum untuk maksimum instruksi proses izin tinggal sementara
p. Persetujuan pendirian cabang di wilayah masuk dan keluar tertentu untuk layanan warga negara-negara anggota CPLP.
q. Perjanjian tentang pemberian visa sementara untuk perawatan medis pada warga CPLP
r. Persetujuan pembebasan biaya provisi dan hutang dengan penerbitan dan perpanjangan izin tinggal bagi warga negara-negara anggota CPLP.

s. Perjanjian kerjasama antara negara anggota CPLP untuk memerangi hiv aids
t. Resolusi tentang review dari statuta CPLP.
u. Statuta forum parlemen CPLP.
v. Perjanjian kerjasama antara negara anggota dalam memerangi penyakit Malaria
w. Perjanjian perubahan protokol kedua untuk ortografi bahasa Portugis.
x. Konvensi tentang pengalihan hukuman bagi warga pelanggar hukum antara negara anggota CPLP.
y. Konvensi mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara amerika dengan negara-negara anggota CPLP.
z. Konvensi ekstradisi antara Amerika dengan negara-negara anggota CPLP.
aa. Konvensi mengenai penentuan pusat kawasan khusus yang tepat untuk pengembangan administrasi publik.
bb. Pusat regional keunggulan dalam pengembangan bisnis.
cc. Perjanjian kerjasama antara negara anggota CPLP di bidang perfilmman dan audiovisual.
dd. Protokol kerjasama CPLP di bidang pertahanan.
ee. Perjanjian pemberian visa bagi mahasiswa nasional negara-negara anggota.
ff. Resolusi CPLP tentang pembentukan majelis parlemen dari CPLP (revisi anggaran dasar CPLP).

gg. Protokol kerjasama antara negara-negara anggota CPLP di bidang keamanan publik.

2. Perjanjian dan Protokol CPLP dengan Entitas Sipil.
   a. Perjanjian Kerjasama dengan Institut Camões.
   b. Perjanjian Kerjasama dengan Yayasan BIAL.
   c. Perjanjian Kerjasama dengan Forum Lusofonia
   d. Protokol pusat kota Lisbon dan Perpustakaan Museum República e Resistência
   e. Protokol Kerjasama dengan Sekretariat Budaya São Paulo dan Yayasan Roberto Marinho
   f. Protokol kerjasama dengan Yayasan pembangunan Luso asal Brasil
   g. Letter of Intent Institut Camões dan Institut Politeknik S. Tome dan Principe, di bawah mediasi CPLP.
   h. Protokol mengenai rekomendasi ikatan Dokter gigi dari Portugal dan Dewan Federal Kedokteran Gigi Brasil.
   i. Perjanjian Kerjasama dengan Lembaga Riset Ilmiah dan Tropis – IICT.
   j. Protokol Kerjasama dengan Radio Renacença.
   k. Protokol gabungan dengan Marketing, Publicidade e Comunicação na Internet (MPCI) atau Pemasaran, Periklanan dan Komunikasi di Internet, LDA.
   l. Protokol Kerjasama di bidang Humaniora dan Teknologi dengan Universitas Lusophone .

m. Protokol Kerjasama dengan Sekolah Pendidikan Garda.
n. Protokol Kerjasama Kebudayaan antara Municipália dengan Sekretaris Eksekutif CPLP.
o. Protokol Jenderal Kerjasama Akademik, Ilmiah dan Budaya antara Universitas Federal Recôncavo Bahia dengan Sekretaris Eksekutif CPLP.
p. Protokol Tambahan pada Kerjasama di bidang Humaniora dan Teknologi antara Universitas Lusophone (ULHT) dengan Sekretariat Eksekutif CPLP.

3. Perjanjian dan protokol CPLP dengan organisasi internasional lainnya.
   a. Perjanjian Kerjasama dengan *International Organization for Migration* – IOM.
   b. Perjanjian dengan Organisasi PBB untuk Organisasi Pangan dan Pertanian – FAO.
   c. Program Kerjasama dengan Konferensi PBB mengenai Perdagangan dan Pembangunan – UNCTAD.
   d. Program Kerjasama pelengkap tambahan CPLP / UNCTAD, dengan partisipasi SEBRAE RS.
   e. Protokol Kerjasama dengan Asosiasi Universitas Bahasa Portugis – AULP.
   f. Perjanjian dengan badan Pendidikan, dan Budaya Organisasi Ilmiah Perserikatan Bangsa-Bangsa – UNESCO.
   g. Perjanjian dengan Perhimpunan Bangsa Latin.

h. Ketentuan Kerjasama dalam CPLP, seperti Pusat Kolaborasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Program tentang HIV / AIDS – UNAIDS.
i. Konvensi Operasional CPLP / UNCTAD / Empretec.
j. Perjanjian basis Kerjasama dengan World Intellectual Property Organization – WIPO.
k. Konvensi kerjasama Pendidikan, Sains dan Budaya dengan Organisasi IBERO dari Amerika
l. Protokol Kerjasama dengan Yayasan Open City International Foundation – FOCA.
m. Memorandum of Understanding dengan International Labour Organization – ILO.
n. Resolusi tentang Kerjasama antara CPLP dan PBB.
o. Protokol Kerjasama Uni ibukota bahasa-Portugis.
p. Uni ibukota bangsa komunitas Portugis-Afrika-Amerika-Asia.
q. Protokol Kerjasama dengan International Labour Organization – ILO.
r. Resolusi pemberian Status pengamat bagi CPLP dalam Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.
s. Perjanjian Kerjasama dengan Uni Ekonomi dan Moneter Afrika Barat UEMOA.
t. Perjanjian tentang Program Kerjasama Teknis dengan FAO (Properti, Tanah dan aspek hukum).

u. Perjanjian dengan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia – OHCHR.
v. Nota Kesepahaman antara Komisi Eropa dan CPLP.
w. Perjanjian Kerjasama antara Sekretariat Konvensi PBB untuk Memerangi Desertifikasi di Negara Terkena Dampak Kekeringan Serius dan / atau Desertifikasi, Terutama di Afrika dan Sekretaris Eksekutif CPLP.
x. Perjanjian Kerjasama antara CPLP dan Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) atau Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian International Fund for Agriculture Development (IFAD) pada Pembangunan Pedesaan.
y. Perjanjian Kerjasama antara Sekretaris Eksekutif CPLP dan unit Radio Portugis PBB.
z. Nota Kesepahaman antara CPLP dan Aliansi Civilisasi. (Listas de Acordos e Protocolos da CPLP", dalam http://www.cplp.orgAdminPublicDWS Download.aspxFile.di akses pada tanggal 28/03/2014).

3.1.2 Pendidikan di Timor Leste

3.1.2.1 Kebijakan Pendidikan Di Timor Leste

Menurut Wayne K. & Miskel menjelaskan bahwa mutu atau kualitas pendidikan adalah hasil penilaian terhadap proses pendidikan dengan harapan yang tinggi untuk dicapai dari upaya pengembangan bakat-bakat para pelanggan

pendidikan melalui proses pendidikan. Demikian mutu pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam proses pendidikan. Oleh karena itu perbaikan proses pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mencapai keunggulan dalam penyelenggaraan pendidikan (Wayne & Miskel, 2001: 15).

Pemerintah mengeluarkan Sistem kebijakan Pendidikan dan Rencana Pembangunan Pemerintah Timor Leste dua dari sepuluh tujuan pemerintah RDTL dalam pembangunan jangka panjang untuk tahun 2020 adalah *"pertama Timor Leste akan menjadi suatu negara yang demokrasi dan memiliki budaya tradisional yang enerjik dan suatu lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kedua masyaratnya akan dapat menulis dan membaca, berpendidikan dan mempunyai ketrampilan, mendapat kesehatan yang baik untuk hidup lebih lama dan produktif, mereka akan terlibat secara aktif dalam bidang ekonomi, pembangunan sosial dan politik, memperluas kesetaraan sosial dan persatuan nasional".*

Untuk memajukan suatu negara yang lebih diandalkan dalam kehidupan negara adalah Sumber Daya Manusia. Kehidupan negara yang sedang dalam proses pembangunan dibutuhkan Sumber daya manusia yang cukup berkualitas untuk dijadikan sebagai sebuah kekuatan dalam proses pembanguna negara Timor Leste. Kemerdekaan Timor Leste untuk kebebasan sebagai negara dalam konteks pembebasan tanah air sudah didapatkannya, namun pada konteks ini tidak lepas dari sebuah pembebasan dari pembodohan dan kemiskinan masih tergolong minim sehingga perlu adanya upaya-upaya untuk meningkatkan

sumber daya manusia yang berkualitas dan bisa memberikan suatu kontribusi pada negaranya.

Pendidikan merupakan sebuah ruang bagi setiap individu yang mempunyai keinginan dan juga mempunyai hak yang penuh untuk dapat mengakses sebuah ilmu pendidikan demi masa depan setiap orang yaitu kebebasan untuk mendapatkan haknya dalam mendapatkan pengetahuan itu sendiri. Pasal 59 ayat I Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste mengatakan bahwa negara akan mengakui dan menjamin hak setiap warga negara atas pendidikan dan kebudayaan, dan negara wajib memajukan pembentukan suatu sistem umum pendidikan dasar yang universal dan wajib, dan selama memungkinkan bebas biaya berdasarkan undang-undang (Konstitusi Republika Democratika de Timor – Leste : 29).

Dalam Konstitusi RDTL (Republika Democratica de Timor-Leste) pada sektor pendidikan memberikan jaminan kepada setiap orang untuk mendapat pendidikan yang gratis sesuai dengan konstitusi, bahwa setiap warga masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama (*Igualdade)* untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan. Pemerintah mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk memeperhatikan di sektor pendidikan dan kebudayaan yang akan memproduksi sumber daya manusia yang berkualitas untuk membangun proses pembangunan negara. Negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk dapat menjamin segala hak dan kewajiban warga negaranya untuk dapat menggunakan hak dasarnya yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan.

Selain itu kualitas pendidikan merupakan kemampuan sistem pendidikan dasar, baik dari segi pengelolaan maupun dari segi proses pendidikan, yang diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah dan faktor-faktor input agar menghasilkan output yang setinggi-tingginya.

Jadi pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dasar untuk belajar, sehingga dapat mengikuti bahkan menjadi pelopor dalam pembaharuan dan perubahan dengan cara memberdayakan sumber-sumber pendidikan secara optimal melalui pembelajaran yang baik dan kondusif.

Pemerintah Timor Leste melihat sektor pendidikan adalah masalah yang harus dilakukan dan mencari jalan yang terbaik untuk menyelesaikan tuntutan-tuntutan masyarakat mengenai pendidikan yang menjadi modal utama untuk mengembangkan suatu negara yang makmur dan sejahtera. Pada sektor ini dapat kita kaji mengenai perubahan-perubahan yang terjadi di Timor Leste pasca kemerdekaan. Sektor pendidikan ini bukan saja sebagai transformasi dan bagaimana mempersiapkan generasi penerus bangsa yang bermoral dan bertanggung jawab, tetapi juga warga negara yang baik dan mengerti akan hak-hak dasar yang melekat pada tiap individu dan menjadi warga negara yang mengenal akan kewajibannya.

Berdasarkan pada Konstitusi RDTL (Republika Democratika Timor Leste), Pasal 59 ayat 4 mengenai Pendidikan dan Kebudayaan, menyatakan bahwa: Pemerintah menjamin pada seluruh masyarakat, untuk meningkatkan

kemampuan atau *skill* dan meningkatkan pengetahuan untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi dan melakukan penelitian ilmiah dan meningkatkan seni.

Pada konteks ini dapat mendeskripsikan bahwa seperti yang tertulis dalam Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya pemerintah mempunyai wewenang untuk meratifikasi Konvensi Internasional itu dan dapat dijadikan sebagai Undang-Undang Domestik, seperti yang diadopsi dari konvensi internasional itu. Pada konteks ini Timor Leste telah meratifikasi konvensi ini, Mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk melakukan laporan bulanan kepada PBB (Perserikatan Bangsa –Bangsa), Untuk meninjau kembali mengenai suatu konvensi yang harus diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Masyarakat pun mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui proses adopsi yang diratifikasinya konvensi tersebut sehingga tidak bertentangan dengan nilai–nilai kebudayaan setempat, dan konvensi ini dapat menjamin hak-hak setiap warga masyarakat untuk melakukan proses kelangsungan hidup (*Survival*) dan memberikan nilai yang positf kepada warga negranya untuk mengekspresikan hak dasar yang melekat pada setiap individu (*inherent*).

Pendidikan merupakan salah satu hal yang paling penting untuk mempersiapkan kesuksesan masa depan pada zaman globalisasi. Pendidikan bisa diraih dengan berbagai macam cara salah satunya pendidikan di sekolah. Pendidikan dalam sejarah peradaban manusia adalah komponen penting yang erat dan tidak terpisahkan dari perjalanan hidup manusia. Kualitas sebuah bangsa dan peradaban ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Ini menjadi

bagianpenting sebab dengan pendidikan, manusia mampu mengembangkan nalar berpikirnya sekaligus meningkatkan taraf hidup dan kemampuan teknis atau pun non-teknis lainnya.

Pendidikan juga merupakan proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Sektor pendidikan menjadi salah satu modal yang paling utama dalam proses pembagunan suatu negara sesuai dengan proses perkembangan pendidikan di suatu negara sesuai dengan pengimplementasian program sistem pendidikan dan kurikulum yang dapat menjamin proses pendidikan yang mampu berikan suatu perubahan yang betul-betul berpihak pada masyarakat atau warga negaranya. Pendidikan adalah kendaraan dasar untuk pengembangan personalitas dan adaptasi sosial. Pendidikan menggambarkan peta dunia yang kompleks yang secara konstan mengalami perubahan. Pendidikan adalah kompas di mana seseorang dapat menemukan jalannya sendiri. Disamping itu pendidikan adalah atmosfer untuk pengembangan potensi pembelajar secara individu dan membuka sepenuhnya bakat seseorang. Berdasarkan hal tersebut UNESCO menyarankan bahwa pendidikan di abad ke 21 harus diformulasikan kembali untuk memenuhi empat pillars, *yaitu learning to know, learning to do, learning to be dan learning to live together.*

3.1.2.2 Periodisasi Pendidikan Di Timor Leste

Negara Timor Leste adalah negara yang dapat dikategorikan sebagai Negara yang baru yang membutuhkan percepatan pengembangan sumberdaya

manusia untuk mampu menggerakkan roda perekonomian negara tersebut. Timor Leste mempunyai berbagai masalah diberbagai sektor pembangunan, sektor pendidikan termasuk didalamnya, pendidikan di Timor Leste mengalami masa perubahan yang panjang. kementerian pendidikan Timor Leste membaginya menjadi tiga periode yakni,(i) Masa Portugis sampai tahun 1975 (ii) Masa Indonesia dari tahun 1975 sampai tahun 1999 (iii) Masa transisi PBB dari tahun 1999 sampai tahun 2002 pada masa kemerdekaan Timor Leste dengan pemerintahan terpilih mulai bulan Mei 2002. sebagai berikut:

Tabel 3.1

Periode Pendidikan Di Timor Leste

TAHUN	SD	SMP	SMA	PT	KETERANGAN
1960	2.979 orang yang sekolah dari kurang lebih 800.000 jiwa Timor Leste	-	-	-	Tidak lebih dari 10% populasi Timor Leste yang berpendidikan.
1975-1999	788 SD, Siswa 167181	114 SMP, Siswa 3219 7	54 SMA, Siswa 18973	UNTIM Hanya 1.8% yang masuk perguruan tinggi	Selama masa pendudukan Indonesia pada sektor pendidikan mendekati 20%
2000-2002	604 SD	62 SMP	23 SMA	Universitas(UNTL) mahasissa sekitar 5000 orang.	230000 yang mengikuti pendidikan dari SD,SMP,SMA.

Sumber : *World Bank Timor Leste,2014.*

Jika kita melihat secara rasio jumlah sekolah di Timor Leste pada akhir tahun 2002 sampai sekarang tampak bahwa kuantitas gedung sekolah untuk SD dan SMP meningkat ini disebabkan beberapa alasan antara lain, dalam Undang-Undang Timor Leste berlaku pendidikan gratis bagi semua siswa dari SD hingga SMA. Pada tahun 2002 pemerintah memberlakukan sistem wajib belajar 9 tahun Pemerintah menambah banyak gedung sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di seluruh pedesaan agar memberi kesempatan secara maksimal kepada masyarakat untuk terlibat dalam pendidikan. Sedangkan SMA menurun karena terkadang distribusi siswa tidak merata dimana tidak semua siswa yang lulus SMP melanjutkan semua ke jenjang pendidikan menengah atas.

Selain itu sebagian besar guru di Timor Leste tidak berkualias karena tidak mempunyai pengalaman pendidikan keguruan namun terpaksa menjadi guru ketika negara ini lepas dari NKRI. Hal senada juga di nyatakan oleh guru-guru Timor Leste sendiri dalam Laporan penelitian Pedro Soares; 2010 dimana para guru menyatakan bahwa *“ a falta de qualidade da formação dos professores; porque muitos professors que ensinam na escola não tem formação inicial a professores.* yang artinya “ Kurangnya kualitas pendidikan dari para Guru, sebab sebagian besar guru yang sekarang mengajar tidak mempunyai latar belakang guru.

3.1.2.3 Kualitas Pendidikan Di Timor Leste

Pemerintah Timor Leste mengambil langka besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan namun pendidikan di Timor Leste kini dihadapkan pada suatu

masalah besar. Sebagian besar pendidik (guru) masih mengajar dengan metode konvensional, dimana sepanjang jam pelajaran guru aktif mencatat dipapan tulis dan murid tinggal mencopy dari apa yang dituliskan oleh gurunya. Mereka juga masih melihat pendidikan merupakan suatu transfer dari sang guru kepada siswanya, proses ini dilakukan oleh hampir seluruh guru di Timor Leste baik dari Guru SD sampai universitas di Timor Leste.

Berdasarkan realitas ini maka sebagian besar guru juga tidak tahu cara mempersiapkan materi pengajaran dan masalah yang dihadapi oleh guru di Timor Leste adalah mereka tidak tahu bagaimana cara menyampaikan materi dan mengadaptasikan kembali topik-topik yang ada dalam buku teks sesuai dengan kehidupan riil yang ada disekitar mereka dan siswa. Untuk perguruan tinggi sendiri pada umumnya masih melakukan hal serupa dimana dosen mencatat dan mahasiswa menyaling karena kurangnya fasilitas yang tersedia. Pengalaman serupa juga dialami oleh seorang volunteer Amerika Curt Gabrielson yang dalam artikelnya mengatakan bahwa " *Truth be told, most classes at UNTL use no textbooks, because books are not readly available in East Timor, are expensive when one can find them and no public money has been budget for them.".* Sejujurnya, hampir sebagian besar kelas di UNTL tidak menggunakan buku teks, sebab belum dapat diperoleh di Timor Leste, kalaupun ada itu sangat mahal jika seseorang ingin memilikinya, dan pemerintahpun tidak mengalokasikan dana untuk ini.

Selain masalah yang telah dikemukakan di atas Timor Leste juga dihadapkan pada perubahan kurikulum pada tahun 2010, dimana hingga sekarang

negara ini masih menggunakan kurikulum yang berbahas Portuguis dan korikulum di Timor Leste di adopsi dari beberapa Negara CPLP seperti Brazil dan portugal. Masalah yang di alami para guru harus belajar bahasa portugis dari awal sehingga bisa melakukan proses belajar mengajar. Sehingga berbagai usulan perbaikan pun dilontarkan baik berupa penyederhanaan materi yang perlu diajari siswa ataupun perubahan struktur pelajaran dengan maksud lebih mendekatkan dengan kehidupan nyata siswa dan orang Timor Leste.

Perubahan kurikulum yang kedua kali di tahun 2010, dengan perubahan sistim proses pembelajaran di mulai pada bulan januari berarti ujian nasional di bulan September dan semua materi digunakan bahasa Portugis. Dari awal kemerdekaan Timor Leste masih mengunakan kurikulum Indonesia dan masih mengunakan buku bahasa Indonesia, akan tetapi dengan kebijakn yang menjadikan bahasa Portugis dan sebagai bahasa Tetum sebagai bahasa nasional maka proses pembelajaran harus mengunakan bahasa Portugis.

Terlepas dari berbagai masalah dalam sektor pendidikan di Timor Leste yang dikemukan sebelumnya negara ini berpeluang besar, untuk dapat menyelengarakan dasar pendidikan yang cukup baik jika mau melihat peluang ini dan membuat terobosan baru. Pemerintah membuat kebijakan untuk merubah kurikulum yang berbahasa Portugis pada tahun 2010 karena memberi perubahan kepada semua guru dan siswa menggunakan metode belajar dengan bahasa Portugis yang menuntun siswa aktif atau kurikulum berbasis kemampuan (*competency based curriculum).*

Akan tetapi masalah yang di alami oleh para guru adalah kurang pengalaman berkualias karena tidak mempunyai pengalaman pendidikan keguruan dan kebanyakan guru tidak berbahasa Portugis. Keberlanjutan proses belajar tersebut sangat bergantung pada tingkat penguasaan bahasa dan struktur bahan yang akan diajarkan. Agar seorang siswa mampu mengenal apakah suatu ide dapat diaplikasikan atau tidak terhadap situasi baru, ia harus mempunyai gambaran yang jelas tentang hakikat fenomena yang dihadapinya. Sebab yang terpenting dalam belajar ide-ide adalah yang dipelajarinya harus dapat diaplikasikan secara luas pada masalah-masalah baru.

3.1.2.4 Kerjasama Untuk Meningkatkan Pendidikan Di Timor Leste

Dengan permasalahan pendidikan yang ada di Timor Leste tersebut pemerintah melakukan kerjasama dengan berbagai Negara dan organisasi internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Timor Leste salah satunya kerjasama yang di lakukan oleh pemerintah adalah dengan organisasi CPLP melalui progrma *Aumento Qualidade Educação e Profissionais* (meningkatkan kualitas pendidikan dan tenaga professional) yang dapat dikelompokan menjadi dua yaitu: Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal. Pemerintah yang memberikan dukungan dan bantuan dalam bidang Pendidikan adalah organisasi CPLP yang mempunyai keinginan untuk membantu Timor Leste di bidang pendidikan. Studi kasus yang ada di Timor Leste, berupa Tenaga Pendidik (*Profesor atau Profesora*) yang di kirim langsung oleh negara anggota CPLP untuk membantu pendidikan di Timor Leste mulai dari Sekolah

SD, SMP, SMU maupun Perguruan Tinggi yang ada di Timor Leste atau di 13 Distrik yang ada di Timor Leste dan negara anggota CPLP juga membantu buku untuk pendidikan di Timor Leste.

Pendidkan formal merupakan pendidikan yang berjalan sesuai dengan prosedur atau aturan–aturan yang telah di tetapkan dalam undung–undang dasar atau kostitusi RDTL (Republica Democratica de Timor Leste.Pendidikan harus harus berjalan sesuai dengan kurikulum yang di tetapkan oleh pemerintah dan melalui Departemen Pendidikan, dengan tahap – tahapanya yaitu mulai dari Escola Primaria atau Sekolah Dasar (SD), Escola Pre Secundaria atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Escola Secundaria atau Sekolah Menengah Atas (SMA). Melalui prosedur dan tahapan–tahapan inilah yang menjadi salah satu tolak ukur Pendidikan Formal yang ada di Timor Leste dan semua bidang yang di pelajari mengunakan bahasa Portugis dalam proses belajar mengajar.

Kerjasama disektor pendidikan formal yang dilakukan oleh CPLP dan Timor Leste tidak sebatas hanya pada tingkat SMU, tetapi sampai pada tingkat Perguruan Tinggi yang mana dilakukan oleh Universitas Nasional Timor Leste (UNTL) . Di Uiversitas Nasional Timor Leste (UNTL) terdapat salah satu fakultas dibawah naungan pengawasan UNTL yaitu Fundasaun Universidade Portuguesa (FUP) untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas pelajar Timor Leste.

Pada konteks lingkungan Akademik Universidade Nasional Timor Leste (UNTL) pada fakultas yang dinamakan FUP (Fundacao Universidede Porugues) atau Fakultas Universitas Portugis di sistem implementasi dan proses perkuliahannya dibawah naungan universitas UNTL dan para Dosen pengajarnya

di datangkan dari Portugal dan dikontrak oleh pemerintahannya untuk memberikan perkuliahan dan juga sebagai dosen tetap di Universidade Nasional Timor Leste (UNTL).

Proses perkuliahan dan pembelajaran seperti yang di terapkan dinegara portugis lainya untuk menyamakan kualitas pendidikan di CPLP, proses perkuliahan yang diterapkan di fakultas FUP/UNTL dan sekolah SD, SMP dan SMA itu langsung dibawah pengawasan pemerintahan negara anggota CPLP yang tugas di timor leste untuk memberikan motifasi dan dorongan kepada generasi muda Timor Leste untuk meningkatkan kemampuan disektor pendidikan.

Berdasarkan pada sektor pendidikan akan memberikan peluang yang baik dalam kerjasama di sektor-sektor yang lain. Pendidikan merupakan prioritas untuk meningkatkan kerjasama dalam meningkatkan kerjasama dan memiliki modal serta mutu dalam memajukan negara yang memulai pembangunan. Perubahan politik bisa dilakukan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan yang di hadapi oleh masyarakat Timor Leste namun di sektor pendidikan akan melanjutkan dan meningkatkan kualitas bagi pelajar Timor Leste. Pada perkembangan sektor pendidikan sangat penting untuk dikaji karna dapat memberikan suatu dukungan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang bermutu dan berkualitas untuk pembangun Timor Leste kedepan.

kerjsama Timor Leste dengan CPLP tidak hanya berupa Tenaga Pendidik (*Profesor atau Profesora*) yang di kirim langsung oleh negara anggota CPLP untuk membantu pendidikan di Timor Leste akan tetapi organisasi tersebut memberikan bantuan dana agar meningkatkan kualitas pendidikan di Timor Leste.

Hal yang dapat menjadi bukti adalah bahwa, Timor Leste lewat keanggotaannya dalam CPLP telah mendapatkan berbagai bantuan-bantuan di berbagai bidang yang menjadi elemen-elemen penting dalam mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, seperti keamanan, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, agrikultur. Bantuan-bantuan tersebut didapatkan melalui kerjasama yang telah dijalankan Timor Leste dengan negara-negara anggota CPLP.

Namun jika dibandingkan dengan bantuan-bantuan yang didapatkan Timor Leste dari negara-negara dan komunitas di luar CPLP yang juga merupakan negara donor seperti Australia, Uni Eropa, Amerika, Jepang, dan Norwegia, Inggris untuk meningkatkan pembangunan di Timor Leste seperti keamanan, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, agrikultur. Negara-negara ini secara ekonomi lebih kuat dari negara-negara CPLP, dalam rangking donor-donor utama bagi Timor Leste, bantuan negara-negara CPLP, justru tidak kalah besar dan menempati posisi sebagai donor terbesar kedua bagi Timor Leste di bawah Australia. Ranking tersebut dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 3.2

Donor bagi Timor Leste sejak 2009-2013

Donor	Australia	CPLP	Uni-Eropa	Amerika	Jepang	Norwegia	Inggris
Jumlah Bantuan (US$)	695.45 Juta	655.21 Juta	229.62 Juta	160.94 Juta	121.16 Juta	93.04 Juta	31.03 Juta

Sumber: "Ponto de situacão em Timor Leste", dalam *http://www.ipad.mne.gov.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=91&Itemid=122*,di akses tanggal 5/08/2014

Bantuan-bantuan yang diterima Pemerintah Timor Leste dari negara tersebut untuk meningkatakan pembangunan di Timor Leste. Dengan bantuan-bantuan dari negara-negara tersebut yang lebih diarahkan keamanan, kesehatan, kebudayaan, agrikultur dan pendidikan. Pendidikan adalah salah satu faktor untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan sumber daya manusia, tentu saja akan menjamin pelaksanaan dan peningkatan pembangunan guna memperoleh suatu masa depan yang lebih baik bagi Timor Leste. Pemerintah mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk memeperhatikan di sektor pendidikan dan kebudayaan yang akan memproduksi sumber daya manusia yang berkualitas untuk membangun proses pembangunan negara. negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk dapat menjamin segala hak dan kewajiban warga negaranya untuk dapat menggunakan hak dasarnya yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan.

Pendidikan merupakan langkah awal untuk dapat memajukan suatu Negara. Negara yang maju merupakan negara yang kaya akan sumber daya manusia terutama berpotensi dan berkualitas dalam segi Ilmu pendidikan serta ilmu pengetahuan. Melalui pendidikan maka manusia bisa mengetahui baik dan buruknya suatu kehidupan dan juga akan suatu ilmu pengetahuan. Begitu juga sebagai negara yang baru serta negara yang baru merdeka perlu meningkatkan kualitas dalam ilmu pendidikan dan ilmu pengetahuan. Sebagai negara baru pendidikan sangat di perlukan baik di sektor pendidikan Formal. Pendidikan formal dapat di tempuh oleh masyarakat yang mempunyai kemampuan dalam segi intelektual.

Pasal 59 ayat I Konstitusi Republik Demokratik Timor –Leste mengatakan bahwa negara akan mengakui dan menjamin hak setiap warga negara atas pendidikan dan kebudayaan dan negara wajib memajukan pembentukan suatu sistem umum pendidikan dasar yang universal dan wajib, dan selama memungkinkan bebas biaya berdasarkan undang-undang. Dalam Konstitusi RDTL (Republika Democratica de Timor-Leste) pada sektor pendidikan memberikan jaminan kepada setiap orang untuk mendapat pendidikan yang gratis sesuai dengan konstitusi, bahwa setiap warga masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama (*Igualdade*) untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang peneliti pakai menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang dikutip dari buku ”Pedoman Penulisan Skrispi dan Pelaksanaan Sidang FISIP Universitas Komputer Indonesia”. Desain penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan metode penelitian deskriptif analitis.

Menurut W. Lawrence Neuman dalam buku berjudul “*Social Research Methods, Qualitive and Quantitive Approaches*”, deskriptif menggambarkan secara spesifik suatu situasi, social setting, ataupun suatu hubungan. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kerjasama yang dilakukan antara Timor Leate dengan organisasi CPLP dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Timor Leste. Penulisan ini juga bersifat analitis karena menjelaskan keterkaitan antara variabel independen dan variabel dependen.

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data

3.2.2.1 Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini akan dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini mengasumsikan bahwa setiap kumpulan informasi tertulis dapat digunakan sebagai indikator sikap, nilai, dan maksud politik dengan cara menelaah secara sistematis menurut kriteria penafsiran kata dan pesan tertentu. Dengan demikian data-data yang digunakan adalah data-data sekunder yang berasal dari dokumentasi dan publikasi. Bentuk data-data tersebut dapat ditemui pada buku referensi, jurnal, majalah atau laporan dari instansi terkait, di samping pemanfaatan sumber-sumber tulisan lainnya seperti fasilitas dan jasa internet untuk mendapatkan data tertulis yang telah didokumentasikan.

Teknik pengupulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisa mengenai kerjasama Timor Leste-CPLP, yang diawali dengan pengumpulan data, *Letter of Intent* (LoI) sebagai naskah perjanjian dan dokumen terkait lainnya.

Data yang diperoleh dari dokumen tertulis kemudian ditelaah, dikelompokan dan dianalisis untuk memperkaya pemanahaman tentang Organisasi CPLP yang menjadi salah satu instrument penyelesaian permasalahan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Timor Leste antara pemerintah Timor Leste dengan organisasi CPLP dalam kerangka meningkatkan kualitas pendidikan Bagi generasi Timor Leste.

3.2.3 Teknik Analisa Data

Teknik analisa yang dipergunakan peneliti adalah data display (penyajian data), dimana susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan, sehingga memudahkan untuk memahami kerjasama yang di lakukan oleh Timor Leste. (W. Lawrence Neuman 2007). menjelaskan dalam penelitian kualitatif menginterpretasikan data dengan cara mengartikan, menerjemahkan dan membuat data tersebut menjadi lebih mudah untuk dipahami melalui sudut pandang peneliti. Tingkat analisis induksionis dalam penelitian ini dimana unit eksplanasinya, yakni kerjasama Timor Leste dengan CPLP lebih tinggi tingkatannya dari unit analisisnya yaitu upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Timor Leste melalui bantuan dari CPLP.

Berangkat dari penjelasan diatas, maka penelitian ini untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi kualitas pendidikan di Timor Leste dan apa saja program yang dilakukan oleh TL dan CPLP dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di TL, selanjutnya melalui teknik ini kemudian ditelaah apa saja yang menjadi kendala-kendala yang menyebabkan program dari kerjasama ini menjadi terhambat serta sejauh mana peran CPLP dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di TL.

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan dengan teknik kualitatif karena informasi yang telah dikumpulkan dari study dokumen. Study dokumen adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan teertulis yang berhubungan dengan masalah

penelitian baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran, majalah, laporan, study pustaka dan lain-lain.

Studi dokumen merupakan upaya pengumpulan data melalui pengkajian terhadap sejumlah dokumen monografi pendidikan timor Leste, bahan-bahan tertulis serta kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian. Untuk mengetahui hal itu, maka dilakukan studi pustaka berupa informasi yang didapat dari buku, jurnal, publikasi, koran maupun penelusuran intern

3.2.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi pada sumber data yang cukup memadai, antara lain:

1. Kedutaan Besar Timor Leste, JL.M.H.Thamrin Kav. 9, Jakarta 10350, Indonesia.
2. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipati Ukur 116. Bandung.
3. Perpustakaan Museum Konferensi Asia Afrika, Jl. Asia Afrika no. 65 Bandung.
4. Perpustakaan Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Besar. Bandung.
5. Perpustakaan Universitas Padjajara, Jl. Raya Jatinangor. Sumedang.

3.2.4.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung sejak bulan Februari 2014 sampai dengan Agustus 2014, yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.3

Waktu Penelitian

		2014					
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei-Jul	Agu
1.	Perencanaan Judul						
2.	Pengajuan Judul						
3.	Usulan Penelitian						
4.	Bimbingan Skripsi						
5.	Pengumpulan Dan Analisis Data						
6.	Sidang Skripsi						